

ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI-BALI, NTB, DAN NTT

Novita Setyaningrum

INTISARI

Transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah, merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi karena adanya transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah seharusnya menjadi awal terlaksananya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT. Penelitian dilakukan pada 44 pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota pada periode tahun 2015 dan 2016.

Pemeringkatan dilakukan berdasarkan tiga tahap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban serta berdasarkan empat kriteria pengukuran yang meliputi ketepatan waktu, ketersediaan, aksesibilitas, dan frekuensi pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015, tiga peringkat tertinggi diperoleh: (1) Pemerintah Provinsi Bali, 2) Kabupaten Badung, dan 3) Kabupaten Jembrana. Pada tahun 2016 diperoleh: 1) Provinsi Bali, 2) Provinsi NTB, dan 3) Kota Mataram. Peringkat terendah pada tahun 2015 dan 2016 diperoleh pemda yang sama yakni Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Dompu.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Bali, NTB, dan NTT berdasarkan Open Budget Index (OBI) masih tergolong Tingkat Keterbukaan Anggaran “Tidak Cukup (*Insufficient*)”. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemda yang menganggap informasi keuangan daerah merupakan rahasia sehingga tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Tiga Pemerintah daerah dengan peringkat tertinggi menunjukkan karakteristik: (1) rata-rata jumlah penduduk yang lebih besar, (2) rata-rata total aset pemerintah daerah yang lebih besar, (3) rata-rata jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, (4) rata-rata opini BPK atas LKPD yang lebih baik, (5) rata-rata rasio PAD yang lebih tinggi, (6) rata-rata total belanja daerah yang lebih besar, dan (7) rata-rata IPM yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Keterbukaan Informasi Publik

TRANSPARENCY ANALYSIS OF WEB BASED LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT AMONG THE LOCAL GOVERNMENTS IN BALI, WEST NUSA TENGGARA (NTB), AND EAST NUSA TENGGARA (NTT)

Novita Setyaningrum

ABSTRACT

Local financial management transparency by providing local financial management information on local governments official websites is an effort to prevent corruption. This is because the transparency is believed to increase public control over the local government financial management. Law Number 14 of 2008 on Public Information Transparency and the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 188.52/1797/SJ on Improving the Transparency of Local Budget Management serve as the basis of local financial management transparency. For this reason, this research is intended to identify the level of local financial management transparency among the local governments in Bali, West Nusa Tenggara (NTB), and East Nusa Tenggara (NTT). The study was conducted among 44 local governments in Bali, NTB and NTT at the provincial, district, and city levels in the periods of 2015 and 2016.

The leveling is based on the three stages of local financial management covering planning stage, implementation stage, reporting, and accountability stage. It is also measured based on the four criteria including timeliness, availability, accessibility, and disclosure frequency. The results show that in the period of 2015, the three highest ranks were (1) the Provincial Government of Bali, 2) Badung Regency, and 3) Jembrana Regency. As for the period of 2016, the three highest ranks were 1) Bali Province, 2) NTB Province, and 3) Mataram City. Meanwhile, the lowest ranks in 2015 and 2016 were occupied by the same local governments, namely North Central Timor District, Alor Regency, and Dompu Regency. In addition, this study also shows that in terms of Budget Transparency Level, the local financial management transparency index in Bali, NTB and NTT based on Open Budget Index (OBI) is still classified as Insufficient. This indicates that many local governments still consider that local financial information is confidential, so that it is not published. Generally, the three local governments with the highest ranks carry these characteristics: (1) bigger population, (2) greater amount of total local government assets, (3) more number of members of the House of Regional Representatives (DPRD), (4) better opinion of the Audit Board of Indonesia (BPK) regarding the Local Government Financial Statement (LKPD), (5) higher ratio of local own-source revenue (PAD), (6) greater amount of total local expenditures, and (7) higher human development index (HDI).

Keywords: transparency, local financial management, public information transparency

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan negara. Lembaga *Transparency International* (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2016. Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati urutan ke-90 dari 176 negara dengan skor CPI sebesar 37. Skor CPI berada pada rentang 0-100, 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat bersih. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung dalam aksi pencegahan, pemberantasan korupsi, dan wajib berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan transparansi pengelolaan keuangan sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang mengamanatkan kepada pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan menu konten dengan nama 'Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah' dalam *website* resmi pemerintah serta mempublikasikan data mutakhir pada menu konten tersebut. Hal ini merupakan langkah konkret pemerintah atas upaya mewujudkan transparansi keuangan daerah.

Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website*. Sofia dan Husen (2013) meneliti tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengungkapan informasi pada *website*. Martani dkk., (2014) melakukan penelitian tentang tingkat pengungkapan transparansi keuangan dan kinerja pemerintah daerah dalam *website* menemukan bahwa transparansi keuangan pemerintah daerah masih rendah. Namun, Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang berwenang nyatanya belum melakukan evaluasi dan pemeringkatan terkait praktik transparansi berbasis *website* di Indonesia, oleh sebab itu pemerintah daerah tidak termotivasi untuk memperbaiki tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerahnya.

Tujuan Penelitian

Penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Menurut Halim dan Abdullah (2006) teori keagenan adalah teori tentang hubungan dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, Hubungan

keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, yaitu pemerintah (eksekutif) sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* yang diwakilkan oleh legislatif (DPR/DPRD). Di dalam kondisi ini dapat muncul permasalahan asimetri informasi, kondisi di mana *agent* memiliki banyak informasi dan dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, sedangkan *principal* yang kekurangan informasi sangat mungkin dirugikan dengan keputusan *agent* (Salle, 2016). Oleh karena itu, *agent* (pemerintah) harus melakukan transparansi dalam penyampaian informasi kepada *principal* (masyarakat).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar setiap biaya yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Rohman, 2011)

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Berbasis Website

Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan daerah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003). Sesuai Instruksi Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah saat ini didukung dengan internet (*website*) sebagai media yang dapat diakses dengan mudah serta biaya yang lebih murah. Adanya akses masyarakat melalui *website* terhadap laporan keuangan suatu pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah sekaligus menuntut tersedianya informasi yang relevan dan handal untuk digunakan.

Open Government Indonesia (OGI) dan Open Budget Index (OBI)

OGI adalah sebuah gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan Pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia. OGI merupakan bagian dari *Open Government Partnership* (OGP). Publikasi dokumen anggaran tepat waktu, yang diukur dengan *Open Budget Survey* oleh IBP merupakan indikator negara anggota OGP (*Open Government Indonesia*, 2016).

The International Budget Partnership's (IBP) melakukan Survei untuk mengukur keterbukaan informasi pengelolaan keuangan pemerintah negara-negara di seluruh dunia. Menurut Huwae (2016) OBI menilai keterbukaan informasi

anggaran menggunakan skor dengan skala 0 sampai 100. Skor OBI kemudian dikategorikan menjadi lima kategori yaitu: (1) sedikit, (2) minimal, (3) terbatas, (4) substansial, dan (5) ekstensif. Berdasarkan lima kategori tersebut, kemudian OBI membagi tingkat keterbukaan anggaran menjadi dua tingkat yaitu tidak cukup terbuka (*insufficient*) dan cukup terbuka (*sufficient*).

Kategori sedikit, minimal dan terbatas dikelompokkan dalam tingkat *insufficient* atau tingkat keterbukaan anggaran dinyatakan tidak cukup terbuka. Kategori substansial dan ekstensif dikelompokkan ke dalam tingkat *sufficient* atau tingkat keterbukaan anggaran dinyatakan cukup terbuka.

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hermans dkk., (2012) melakukan pengukuran terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data *website* pada 33 provinsi, 349 kabupaten, dan 91 kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi kesenjangan digital antara tingkat pemerintah daerah dan antara daerah di pulau Jawa dengan daerah di luar Jawa.

Pada tahun berikutnya, Sofia dan Husen (2013) melakukan analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengungkapan informasi pada *website*. Penelitian ini dilakukan terhadap 491 *website* kabupaten/kota se-Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata indeks pengungkapan informasi keuangan terbukti lebih rendah

daripada rata-rata indeks non keuangan, dan analisis perbandingan antara Pemda di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa semakin memperkuat terjadinya disparitas di Indonesia.

Martani (2014) melakukan penelitian dengan menggunakan 429 data *website* pemda di Indonesia. Penelitian ini mengukur transparansi informasi pengelolaan keuangan daerah menggunakan dua kriteria informasi yaitu ketersediaan dan aksesibilitas, menunjukkan bahwa tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja dalam *website* resmi pemda hanya sebesar 15%.

Huwae (2016) menganalisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan studi di provinsi daerah istimewa yogyakarta. Penelitian ini membangun instrumen dan mengevaluasi instrumen keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa instrumen keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah yang dibangun dapat digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui situs resmi pemda.

Penelitian Syamsul (2017) mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 34 pemprov di Indonesia menggunakan data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016 yang dimuat di dalam *website* terkait. Penelitian ini mengukur masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada tiga kriteria utama informasi yaitu ketersediaan, aksesibilitas dan ketepatan waktu pengungkapan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat

transparansi pengelolaan daerah masih sangat rendah, yaitu sebesar 16,84%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Hal yang diamati dalam analisis ini berupa dokumen yang terdapat pada *website* resmi pemda.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini ialah data sekunder yang berupa dokumen pengelolaan keuangan daerah yang dipublikasikan pada *website* resmi pemda pada periode 2015 dan 2016.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan 29 Indikator yang dibangun oleh Huwae (2016). Penentuan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa hal berikut.

1. Pengukuran menggunakan skor dikotomi. Jika item tersebut tersedia, dapat diakses, tepat waktu, dan frekuensi pengungkapannya ada, maka nilai masing-masing ialah 1 untuk setiap kriteria. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka masing-masing akan diberi nilai 0.
2. Nilai untuk setiap kriteria dikalikan 0.25.
3. Nilai dari seluruh indikator baik untuk aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dijumlahkan untuk didapatkan nilai total.
4. Indeks transparansi dihitung dengan membagi total akumulasi nilai seluruh indikator dengan jumlah indikator, selanjutnya dikalikan 100%.
5. Setelah indeks transparansi diketahui, selanjutnya dilakukan pemeringkatan dengan membandingkannya dengan pemda lain.

6. Langkah selanjutnya, transparansi pengelolaan keuangan daerah dikategorikan berdasarkan peringkat keterbukaan informasi oleh *International Budget Partnership* (IBP). IBP ialah lembaga independen internasional yang melakukan survei keterbukaan anggaran yang disebut *Open Budget Index* (OBI). Survei ini dilakukan untuk mengukur keterbukaan informasi pengelolaan keuangan pemerintah negara-negara di seluruh dunia.

Validitas Data

Validitas data pada penelitian ini menggunakan metode *peer debriefing*. Creswell (2014) menjelaskan bahwa *peer debriefing* berarti menggunakan orang lain untuk membantu menelaah dan melakukan tanya jawab mengenai penelitian sehingga pemahamannya selaras dengan peneliti. *Peer debriefer* pada penelitian ini ialah mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada berjumlah 3 orang yang melakukan penelitian sejenis dengan topik transparansi pengelolaan keuangan daerah.

PEMAPARAN TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian ini dilakukan pada 44 *website* Pemerintah Daerah di Bali dan Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, tetapi hanya 39 pemerintah daerah yang *website*-nya aktif dan dapat dilakukan penilaian.

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahap perencanaan, baik untuk tahun 2015 maupun 2016 digunakan 10 indikator

penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian, perbandingan rata-rata skor dan indeks pada tahap pelaksanaan pada tahun 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2015. Rata-rata skor dan indeks pada tahap pelaksanaan mengalami penurunan skor sebesar 0,52 dan indeks sebesar 5,79%.

Indikator tahap pelaksanaan nomor 2 yaitu Informasi Realisasi Belanja Daerah merupakan indikator yang paling banyak mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,16. Indikator nomor 7 yaitu informasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator yang paling banyak dipenuhi.

2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahap pelaksanaan, baik untuk tahun 2015 maupun 2016 digunakan 9 indikator penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian, Perbandingan rata-rata skor dan indeks pada tahap pelaksanaan pada tahun 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2015. Rata-rata skor dan indeks pada tahap pelaksanaan mengalami penurunan skor sebesar 0,52 dan indeks sebesar 5,79%.

Indikator tahap pelaksanaan nomor 2 yaitu Informasi Realisasi Belanja Daerah merupakan indikator yang paling banyak mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,16. Indikator nomor 8 yaitu Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan indikator yang paling banyak dipenuhi pada tahun 2015 dan 2016 oleh pemerintah daerah terkait.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, tahun 2015 menggunakan 10 indikator dan tahun 2016 menggunakan 8 indikator penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah. perbandingan rata-rata skor dan indeks pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahun 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2015. Rata-rata skor dan indeks pada tahap pelaksanaan mengalami penurunan skor sebesar 0,55 dan indeks sebesar 4,64%.

Indikator tahap pelaksanaan nomor 5 yaitu Informasi Neraca merupakan indikator yang paling banyak mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,12. Indikator nomor 5 yaitu Informasi Neraca merupakan indikator yang paling banyak dipenuhi oleh pemerintah daerah terkait.

4. Pemingkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Setelah diperoleh indeks transparansi yang merupakan hasil dari pengukuran, kemudian dilakukan pemingkatan berdasar indeks transparansi tertinggi hingga terendah. Untuk tahun 2015, tiga pemda yang menduduki peringkat teratas peraih indeks transparansi tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Bali, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Jembrana. Untuk tahun 2016, tiga pemda yang menduduki peringkat teratas peraih indeks transparansi tertinggi berturut-turut yaitu Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Kota Mataram.

Tiga pemda di posisi terendah tahun 2015 dan 2016 sama yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Dompu Secara akumulatif, Skor dan indeks pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yaitu penurunan skor sebesar 1,52 (4,54%).

5. Pengategorian tingkat transparansi berdasarkan Open Budget Index (OBI)

Pengategorian tingkat transparansi pemda di Bali, NTB, dan NTT berdasarkan Open Budget Index (OBI) menunjukkan Tingkat keterbukaan informasi pada tahun 2015 dan 2016 tidak mempunyai perbedaan, pada kedua tahun tersebut pemerintah Daerah di Bali, NTB, dan NTT masih tergolong ke dalam tingkat keterbukaan informasi “Tidak Cukup (*Insufficient*)” dimana masih berada pada indeks di bawah 61%.

Menurut kategori keterbukaan informasi pada tahun 2016 kategori Minimal (*Minimal*) mengalami penurunan. Kategori Minimal (*Minimal*) tahun 2016 hanya diduduki oleh 3 pemda, ini menunjukkan adanya penurunan karena pada tahun 2015 terdapat 12 pemda yang menduduki kategori tersebut.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar skor transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 mengalami penurunan. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh indikator yang digunakan pada tahun 2016 yaitu 27, indikator tersebut lebih sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 29 indikator. Selain itu, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota yang diteliti lebih banyak mempublikasikan informasi pengelolaan keuangan daerah tahun 2015 dibandingkan tahun 2016.

6. Pengidentifikasian Karakteristik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Tingkat Transparansi Tertinggi dan Terendah

Pengidentifikasian bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang membedakan pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh predikat tertinggi dan terendah. Pengidentifikasian dilakukan pada tiga kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi dan tiga kabupaten/kota dengan tingkat transparansi terendah. Pengidentifikasian dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dengan mencari data dan informasi terkait kondisi pemerintah kabupaten/kota yang relevan dengan penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pengidentifikasian dilakukan pada delapan aspek yaitu yaitu: (1) kompleksitas pemerintah daerah, (2) ukuran pemerintah daerah, (3) ukuran legislatif, (4) Opini BPK atas LKPD, (5) kekayaan pemerintah daerah, (6) belanja daerah, (7) kompetisi politik, dan (8) tingkat pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi tertinggi dan terendah.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut.

1. Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT ialah sebesar 15,04% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 10,54% di tahun 2016. Nilai tersebut tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan nilai indeks maksimal sebesar 100%.

2. Berdasarkan skor per tahapan pengelolaan keuangan daerah, dokumen yang paling banyak dipenuhi oleh 39 pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT ialah dokumen pada tahap pelaksanaan dengan rata-rata skor sebesar 2,04 di tahun 2015 dan 1,52 di tahun 2016. Sedangkan, dokumen yang paling sedikit dipenuhi ialah pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan rata-rata skor sebesar 0,91 di tahun 2015 dan menurun menjadi 0,36 di tahun 2016.
3. Berdasarkan skor per kriteria pengukuran menunjukkan kriteria yang paling banyak dipenuhi ialah kriteria ketersediaan dan aksesibilitas dengan rata-rata skor sebesar 1,51 untuk tahun 2015 dan 0,65 untuk tahun 2016, sedangkan kriteria yang paling sedikit dapat dipenuhi yaitu kriteria ketepatan waktu pengungkapan yaitu dengan rata-rata skor sebesar 0,37 untuk tahun 2015 dan 0,34 untuk tahun 2016.
4. Indeks transparansi pengelolaan keuangan tertinggi tahun 2015 diraih oleh pemerintah daerah yang sama, yaitu Provinsi Bali dengan indeks transparansi sebesar 50,57% untuk tahun 2015, dan 41,98% untuk tahun 2016. Peringkat terendah pada tahun 2015 dan 2016 diraih pemerintah daerah yang sama yaitu Kabupaten Dompu, dengan indeks transparansi 0,00% pada tahun 2015, dan 2,78% pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umum.
5. Hasil pengkategorian tingkat keterbukaan informasi publik menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (*insufficient*) karena seluruh pemerintah daerah meraih indeks di bawah 61%.
6. Identifikasi karakteristik menunjukkan: rata-rata jumlah penduduk yang lebih besar, rata-rata total aset pemerintah kabupaten/kota yang lebih besar, rata-rata jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, rata-rata opini BPK atas LKPD yang lebih baik, rata-rata rasio PAD yang lebih tinggi, rata-rata total belanja daerah yang lebih besar, dan rata-rata IPM yang lebih tinggi dapat digunakan sebagai karakteristik yang membedakan, sedangkan kompetisi politik tidak dapat digunakan sebagai karakteristik yang membedakan suatu pemerintah daerah yang tergolong ke dalam tingkat transparansi tertinggi atau terendah.

Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian ini dilakukan pada 44 pemerintah kabupaten/kota di Bali, NTB, dan NTT. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak pemerintah daerah yang dijadikan obyek penelitian, sehingga dapat memberikan

gambaran yang lebih luas mengenai penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

2. Penelitian ini menggunakan empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan. Masing-masing kriteria diberi bobot yang sama yaitu 0,25 berdasarkan asumsi peneliti, karena keempat kriteria tersebut dianggap sama penting. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan kriteria pengukuran lainnya dan melakukan validitas ahli untuk menentukan bobot atas masing-masing kriteria secara lebih komprehensif.
3. Penelitian ini menggunakan telaah literatur dan kajian atas penelitian terdahulu, belum melakukan observasi secara lebih mendalam. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan wawancara dan *focus group discussion* untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah terkait.

Rekomendasi Penelitian

Beberapa rekomendasi praktis yang dapat diambil terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah di antaranya:

- a. Kementerian Dalam Negeri
Melakukan pemeringkatan resmi atas transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang dilakukan secara

berkala. Pemeringkatan tersebut sebagai alat ukur kepatuhan atas peraturan perundangan dan sebagai motivasi bagi pemerintah daerah agar lebih transparan di dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri hendaknya menerapkan sanksi secara tegas terhadap pemerintah daerah yang belum melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran.

- b. Pemerintah Daerah
Bagi pemerintah daerah yang telah memiliki website resmi, tetapi tidak dapat diakses karena berbagai penyebab seperti *website offline*. Pemerintah daerah hendaknya melakukan pengecekan dan perbaikan secara berkala sehingga dapat menampilkan informasi-informasi terkait pengelolaan keuangan daerah pada website resmi secara lengkap sesuai amanat peraturan perundangan, mudah diakses, tepat waktu dan memperhatikan keruntutan pengungkapan pada tahun-tahun sebelumnya;
- c. DPRD
Melakukan pengawasan dan tekanan secara lebih instensif kepada pemerintah daerah terkait penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. Kepada Masyarakat

Masyarakat lebih aktif dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dan menggunakan haknya untuk mengakses informasi-informasi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyani, 2015. *Ini Daftar 122 Daerah Tertinggal 2015-2019*. <http://infobanknews.com/ini-daftar-122-daerah-tertinggal-2015-2019/> diakses tanggal 9 Maret 2017 pukul 22.17 WIB.

Ar.Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Arikunto, 2002. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015*. BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015*.BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015. BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015*. BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015*. BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2015*. BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015*. BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara Tahun Anggaran 2015*. BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Provinsi Bali Dalam Angka 2016*. BPS Provinsi Bali. <https://bali.bps.go.id/> diakses tanggal 10 Juni 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. <http://ntb.bps.go.id/> diakses tanggal 10 Juni 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. <http://ntt.bps.go.id/> diakses tanggal 10 Juni 2017.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Baik.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design : Kualitatif, Kuantitatif, and Mixed Methods Approaches* 4th Edition. Sage Publications : California.
- Creswell, J.W., 2016. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dartika, 2012. *Peran dan Fungsi Website Pemerintahan sebagai Sarana Komunikasi yang Efektif (G2C – Governance to Citizen)*. <https://dartika.wordpress.com/2010/03/12/peran-dan-fungsi-website-pemerintahan-sebagai-sarana-komunikasi-yang-efektif-g2c-%E2%80%93-governance-to-citizen-2/> diakses tanggal 9 Maret 2017 pukul 22.17 WIB.
- Eisenhardt, Kathleem, 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review*. Academy of Management Review, 14. Page 58
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Halim, Abdul. dan Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2 Nomor 1. Hal.: 53-64
- Harahap, Tara Zalma, 2016. Pengaruh Tipe Pemda, Opini Bpk, dan Jumlah Penduduk Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Di Website Resmi Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Skripsi Universitas Sumatera Utara
- Harnowati, Aatina Izzati Penta. 2017. *Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis. Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hennink, M., Hutter, I. and Bailey, A., 2010. *Qualitative Research Methods*. Sage Publications : California.

- Hermana, B., A. Tarigan, H. Medyawati, dan W. Silfianti. 2012. E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web. *3rd. International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR*. Vol. 27, pp. 194-199.
- Holsti, O. R., 1969. *Content analysis for the social sciences and humanities*. Reading, Mass., Addison-Wesley Pub. Co.
- Hsieh, Hsiu Fang and Shannon, S.E. *Three Approaches to Qualitative Content Analysis*. *Qualitative Health Research*, Vol. 15 No. 9, November 2005 1277-1288
- Huwae, K. 2016. *Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis. Maksi UGM Yogyakarta, tidak dipublikasikan.
- Ingram, Robert W. 1984. Economic Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices. *Journal of Accounting Research*. Vol. 22, No.1, pp. 126-144.
- International Budget Partnership (IBP), 2015. "Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live." Diakses pada tanggal 20 Februari 2017. <http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Report-English.pdf>.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* . *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- Katz, Ellen. 2004. *Transparancy in Government How American Citizens Influence Public Policy*. *Journal of Accountancy*, page 1-2, Juni 2004.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Martani, D., D. Fitriasari, dan Annisa. 2014. *Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Vol. 60, No. 3, pp. 504-516.
- Medina, F., 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Akuntansi. Universitas Indonesia. Depok.
- Moe, T. M. 1984. *The new economics of organization*. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muid, Dul dan Hargyantoro, Febrian. 2012. *Pengaruh internet financial reporting dan tingkat Pengungkapan informasi website terhadap frekuensi Perdagangan saham perusahaan*. *Jurnal*

- Akuntansi Indonesia, Vol. 1 No. 1 Januari 2012: Hal. 11 – 19.
- Munir, 2013 . Multimedia dan Konsep Aplikasi Dalam Pendidikan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nasution, Anwar. 2009. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi. diakses tanggal 30 Juni 2017. <http://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2009/04/dialog-publik-manado2.pdf>
- Nosihana, Ariefia dan Rizal Yaya. 2016. Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3, No. 2, pp. 89-104.
- Pearson, J. M., A. Pearson, et al. 2007. *Determining the importance of key criteria in web usability*. *Management Research News* 30(11): 816-828.
- Philip, Kotler and Armstrong, Gary. 2012. *Principles of Marketing*. Global Edition. 14 Edition: Pearson Education.
- Pratama, Kadek Aris Dwi, D. S. Sri Werastuti, dan Edy Sujana. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 3, No. 1, pp. 1-1
- Puspita, Rora & Martani, Dwi. 2012. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda*. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin. 20-23 September 2012.
- Rahim, Wanda Mustika dan Dwi Martani. 2015. *Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetensi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Indonesia. Jakarta
- Rahmad, Jalaluddin, 2001. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statis*, Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia, 2001. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.*
- Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*
- Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).*
- Republik Indonesia, 2012. *Instruksi Mendagri Nomor 188. 52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).*
- Republik Indonesia, 2015. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.*
- Ritonga, I. T. (2009). *Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah di Indonesia.* Sekolah Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta
- Rudiyanto, Bartolomeus dan Heribertus Purwanugraha. 2015. “*Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Pada Website Pemda*”. Diakses pada tanggal 25 Mei 2017. <http://e-journal.uajy.ac.id/8970/1/JURNAL.pdf>
- Salle, Agustinus. 2016. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Volume 1 No. 1 Tahun 2016.
- Sekaran, Uma dan R. Bougie. 2013. *Research Methods for Business.* West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.* Vol. 9, No. 2, pp. 154-170.
- Sofia, A dan B. Husen. 2013. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi pada Website (Studi pada Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia). *Jurnal Media Indonesia.* Vol. 12, No. 4, pp. 297-308.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung : Alfabeta.
- Syamsul. 2017. *Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris*

- pada Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Tesis. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Transparency International Indonesia. 2017. *Corruption Perceptions Index 2016*. diakses tanggal 21 Februari 2017.
<https://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>
- USDRP, 2010. *Buku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah (USDRP)*. Jakarta : USDRP.
- Wasistiono, Sadu. Wiyoso, Yonatan. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)* ; Fokus Media
- Wikipedia. 2017. “Kabupaten Badung”. Diakses pada 5 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Badung
- Wikipedia. 2017. “Kabupaten Jembrana”. Diakses pada 5 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jembrana
- Wikipedia. 2017. “Kabupaten Timur Tengah Utara”. Diakses pada 5 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Timur_Tengah_Utara
- Wikipedia. 2017. “Kabupaten Alor”. Diakses pada 5 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Alor
- Wikipedia. 2017. “Kabupaten Dompu”. Diakses pada 5 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dompu
- Wikipedia. 2017. “Kabupaten Klungkung”. Diakses pada 5 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klungkung
- Wikipedia. 2017. “Kota Mataram”. Diakses pada 5 Juni 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mataram